

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Di dalam sebuah karya penelitian, seperti karya tulis yang berupa skripsi, tidak ada yang sifatnya mutlak asli (original) dan benar-benar baru dihasilkan oleh seorang penulis maupun peneliti. Semua penelitian tidak pernah lepas dari pengaruh penelitian-penelitian sebelumnya ataupun melakukan revisi atas penelitian terdahulu. Literatur reviu ini berfungsi agar peneliti dapat mengetahui, mengenal dan memahami penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka darinitu penulis berusaha mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Tulisan-tulisan terdahulu tersebut diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, *press release*, skripsi dan berita-berita resmi.

Literatur pertama adalah (Firnas, 2003) dengan judul **“Prospek Demokrasi Myanmar”** Di dalam tulisan ini, Adian Firnas menjelaskan Sejak Jenderal Ne Win sampai Jenderal Than Shwe rezim militer menjalankan kebijakan yang sama yakni memberangus nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya dengan tatanan yang bersifat sentralistik dan otoriter. Setiap gerakan demokrasi yang muncul sudah pasti mendapat perlawanan dari rezim yang berkuasa. Seberapa pun derasnya arus demokrasi melanda negara ini, pemerintahan militer yang berkuasa semakin keras pula membendung gerakan itu contohnya adalah penolakan militer terhadap hasil pemilu tahun 1990 yang menempatkan Aung San Suu Kyi bersama partainya National League for Democratic (NLD) sebagai pemenang. Dan militer malah

memberlakukan tahanan rumah kepada Aung San Suu Kyi dan melakukan pelanggaran HAM ke banyak anggota partai NLD karena dianggap sebagai pemberontak negara.

Intervensi Militer ke dalam Sistem Politik Myanmar Ketika Myanmar merdeka pada tahun 1948 (waktu itu bernama Burma), di bawah pemerintahan sipil U Nu, ia mencoba menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan sistem parlementer. Sebagaimana halnya negara yang baru merdeka, pemerintahan U Nu juga dihadapkan pada keadaan sosio-politik yang rumit. Karena pemerintah sipil tidak dapat menata kembali kondisi dalam negeri Myanmar, yang semakin diperparah dengan kegagalan U Nu dalam menata sistem perekonomian dan administrasi Myanmar, maka timbul ketidakpuasan di kalangan pro-militer dan militer. Sehingga pada tahun 1962 militer melakukan kudeta dan mulai runtuh lah demokrasi di Myanmar.

Setelah kekuasaan diambil paksa oleh militer. Mereka membuat partai baru yang bernama BSPP atau yang lebih dikenal dengan Partai Lenzin ini bisa dikatakan sebagai partai tunggal yang dilaksanakan untuk mendukung program sosialis dengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer. Sejak berdiri tahun 1962 dan disahkan tahun 1964 keanggotaan partai ini didominasi oleh militer. Keterlibatan militer dalam kegagalan demokrasi kembali dilakukan pada tahun 1990. Pada dasarnya kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan militer. Sebagaimana pendahulunya, pemerintahan militer Jenderal Saw Maung juga memimpin negara dengan otoriter. Hasil ini sesungguhnya di luar prediksi militer. Berbagai protes rakyat dihadapi dengan tindakan represif oleh militer

Literatur kedua adalah karya (Nilsen, 2013) yang berjudul **“Will democracy bring peace to Myanmar?”**. Artikel ini bertujuan untuk menilai perkembangan politik di Myanmar dan dampak transisi demokrasi pada konflik etnis yang terus-menerus terjadi di negara itu. Artikel ini menganalisis dinamika dalam hubungan segitiga antara elit yang berkuasa, oposisi demokratis dan kelompok etnis. Tiga pihak yang diperlukan dalam proses perdamaian di Myanmar. Dengan reformasi, perjanjian gencatan senjata baru telah ditandatangani, sensor media mereda dan tahanan politik dibebaskan, yang pada gilirannya mengarah pada penangguhan sanksi internasional dan peningkatan antisipasi di Myanmar untuk kemajuan ekonomi.

Asumsi bahwa demokrasi akan menjadi solusi untuk semua masalah negara telah dipegang secara luas di antara banyak dari mereka yang memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Akan tetapi, tidak semudah yang diharapkan, karena Myanmar memiliki konflik dalam negerinya yang cukup rumit, salah satunya adalah adanya konflik etnis. Horowitz 1993 mengatakan bahwa negara-negara yang secara etnis terpecah tidak mungkin melihat transisi demokrasi tanpa konflik. Faktanya, mereka menemukan bahwa kemungkinan perang saudara dua kali lebih tinggi di negara-negara di mana kelompok etnis terbesar merupakan setengah dari populasi seperti di negara-negara di mana 95% dari populasi terdiri dari kelompok mayoritas. Untuk negara yang sudah dilanda perang saudara seperti Myanmar, di mana mayoritas Bamar merupakan sekitar 65% dari total populasi (Smith, 1999: 30), dan di mana proses deomkatisasi lambat dan membosankan, dan kemungkinan besar akan terjadi terus begitu.

Faktanya, sejak dimulainya transisi demokrasi pada tahun 2010 kita telah melihat peningkatan yang signifikan dalam kematian terkait pertempuran di Myanmar. Ada juga laporan berulang tentang bentrokan antara tentara Myanmar dan tentara etnis minoritas di Negara Bagian Shan dan Negara Bagian Kayin. Seperti yang dikemukakan oleh Cederman dkk., Demokratisasi juga dapat memicu konflik baru melalui pembukaan arena politik, persaingan politik yang menghasilkan pemenang dan pecundang, dan urutan destabilisasi prosedur demokrasi (Cederman et al., 2010: 387)

Selama Myanmar konflik etnis yang terus-menerus - tantangan politik utamanya - masih belum terselesaikan, wajar untuk memprediksi bahwa tren peningkatan kekerasan akan terus berlanjut. Selama reformasi politik dan pemilihan umum, taruhan politiknya tinggi, dan konflik dapat semakin meningkat. Argumen dari artikel ini adalah bahwa demokratisasi tidak dengan sendirinya memberikan solusi yang layak untuk konflik etnis di suatu negara

Literatur ketiga adalah skripsi karya Putri Evi Oviyanti Batu Bara dari universitas Sumatera Utara yang berjudul **“Peran dan Upaya Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar (Studi : dari masa kekuasaan Junta Militer 1988 hingga tahun 2012)”**. Di dalam tulisan ini, Putri Evi menjelaskan bahwa Myanmar pada rezim Junta militer menerapkan sistem politik yang tidak demokratis, keadaan ini dilihat dari beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan rezim tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi.

- Pelanggaran HAM, Beberapa kasus pelanggaran Rezim Junta militer yang berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 sering mendapat kecaman dari

HAM yang dilakukan oleh Junta militer seperti: Tindakan represif Junta militer dalam pada tahun 1988 dimana militer menggilas para demonstran sehingga menewaskan 3000 orang. Pemberontakan etnis Karen, etnis minoritas terbesar kedua setelah Shan, dihadapi dengan brutalisme tanpa ampun yang telah merenggut ribuan jiwa. Kasus pemerkosaan yang melibatkan militer terhadap wanita etnis Shan. Pada tahun 1992, pembantaian terhadap suku Rohingnya yang merupakan suku minoritas di Myanmar. Penahanan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi tanpa proses pengadilan. Kekerasan terhadap demonstran yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2007.

- Sektor ekonomi, segala usaha perekonomian di Myanmar dikuasai penuh oleh negara yang dalam hal ini adalah Junta militer. Penguasaan atas akses ekonomi diawali dengan mengambil alih pengelolaan asset-aset kolonial Inggris, seperti perusahaan pelayaran, perkebunan, gedung dan beragam industri lainnya. Pemerintahan Junta melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Rezim junta militer juga memiliki hak tanpa batas untuk mempekerjakan rakyat dengan upah minimum untuk kepentingan bisnis kelompok tersebut.
- Aktifitas-aktifitas yang dapat menentukan karakteristik suatu bangsa seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemilihan umum secara teratur dan demokratis, penegakan hukum, hubungan legislatif dan eksekutif yang seimbang. Keseluruh aktifitas tersebut mempunyai tingkat yang rendah di

Myanmar karena kediktatoran pemerintahan militer yang tidak pro Demokrasi.

Aung San Suu Kyi merupakan pemimpin yang kharismatik, karena mampu memiliki pengikut yang banyak akibat dari aksi revolusioner yang memperjuangkan demokrasi dan meruntuhkan rezim Junta militer. Demokrasi sebagai tujuan suu kyi dan pengikut nya, para pendukung demokrasi sering melakukan pertemuan di rumah Suu Kyi, dan mereka kemudian membentuk Partai Politik baru dengan menyatukan beberapa kelompok politik kecil pada 27 September 1988, sebulan setelah penindasan brutal League for Democracy (NLD) atau Liga Nasional untuk Demokrasi. Ketuanya adalah Suu Kyi. Aung San Suu Kyi mendapat otoritas sebagai pemimpin pro Demokrasi di Myanmar bukan atas dasar suku, kekuatan kapital, kedudukan dan bukan melalui proses berNegara yang di atur Negara Myanmar pada saat itu, Karena Myanmar pada saat itu hanya menggunakan 1 partai saja. Keadaan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Weber bahwa satu-satunya dasar otoritas karismatik adalah pengakuan atau penerimaan dari klaim pemimpin oleh pengikut. Otoritas karismatik bisa menjadi revolusioner di alam menantang otoritas tradisional dan terkadang rasional-hukum. Tipe otoritas ini dengan mudah bisa berubah menjadi otoritas tradisional di mana kekuasaan tersebut dilakukan oleh mereka yang mengelilingi pemimpin karismatik.

Dengan kebebasan yang sudah diperolehnya, Suu Kyi bekerja di dalam parlemen demi terciptanya demokrasi dalam sistem politik Myanmar, meskipun orang-orang militer dan partai pemerintah masih menguasai suara yang besar

terhadap setiap keputusan parlemen. Suu Kyi mendapatkan banyak kunjungan dari tokoh-tokoh dunia, salah satunya adalah perdana Menteri Inggris, David Cameron. Kunjungan ini dimanfaatkan Suu Kyi untuk meminta Inggris dan negara Uni Eropa lainnya mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Suu Kyi juga melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa takut tidak bisa kembali ke Myanmar. Kunjungannya ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Barack Obama memberi pengaruh yang besar terhadap dicabutnya sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Myanmar. Dengan kebebasan yang diperolehnya setelah bebas sebagai tahanan rumah dan kedudukannya sebagai anggota parlemen, membuat semakin terbukanya proses demokratisasi di Myanmar. Kedudukannya di parlemen, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan yang selama ini diinginkan rakyat Myanmar. Keberadaan dan peranan Suu Kyi sebagai tokoh yang terkenal dan disegani oleh pemimpin dunia, juga diharapkan dapat membawa dampak positif agar semakin terbuka dan membaiknya citra Myanmar di dunia internasional

Literature terakhir adalah (Apriyanti, 2014) yang berjudul “**Reformasi politik dan ekonomi di Myanmar pada masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013)**”. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana reformasi politik dan ekonomi yang terjadi di Myanmar setelah dilakukannya pemilu 2010. Setelah dilantik pemerintah U Thein Sein segera melakukan perubahan-perubahan besar yang sebelumnya belum pernah terjadi di Myanmar. Pemerintah U Thein Sein melakukan reformasi di bidang politik dan ekonomi. Alasan dilakukannya reformasi ini karena Myanmar pada saat itu mengalami masalah yang sangat kompleks, yang mana menurut U Thein Sein perlu untuk

melakukan perubahan untuk menjadikan Myanmar negara yang sejahtera dan maju. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah adanya pemerintahan yang otoriter, masalah Hak Asasi Manusia, adanya perekonomian yang lemah dan tidak stabil, serta tidak adanya kebebasan buruh dan juga pers.

Sebelum terjadi banyak sekali permasalahan yang terjadi di Myanmar, salah satunya adalah pelanggaran HAM yang terjadi dimasa pemerintahan Than Shwe yang dimana Ekonomi, hukum, sosial, keberagaman budaya, kebebasan politik semua mengalami penurunan selama masa kekuasaan tersebut. Catatan terhadap Hak Asasi Manusia di Myanmar tercatat sebagai yang paling buruk di dunia. Akibatnya banyak negara-negara yang memberikan tanggapan atas tindakan tersebut, terutama negara Barat yang umumnya memberikan hukuman diplomatik seperti pengenaan terhadap sanksi ekonomi, penarikan bantuan dan kerjasama internasional

Reformasi ini bertujuan untuk menjadikan Myanmar negara yang lebih demokrasi dan mengedepankan hak-hak manusia. Selain itu juga reformasi ini juga berusaha agar Myanmar dapat menciptakan perekonomian yang lebih maju dan meningkatkan kehidupan rakyat Myanmar.

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah penulis dalam menemukan jawabahn dari penelitian ini maka suatu landasan konseptual ini sangatlah diperlukan untuk memperkuat analisa yang akan dilakukan. Maka dari itulah, diperlukannya landasan teori maupun konsep yang relevan dengan permasalahannya. Kerangka konseptual ini

berfungsi sebagai dasar argumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan merupakan sumber serta landasan untuk menganalisa suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis.

2.2.1 Demokratisasi

Menurut David Potter , demokratisasi adalah suatu perubahan politik yang bergerak ke arah sistem politik yang demokratis. Sementara itu, Jose Abueva menyatakan bahwa demokratisasi adalah sebuah proses perubahan nilai-nilai dan tingkah laku dari konsep “partikularisme” menuju “universalisme”, dan membangun institusi untuk menciptakan nilai universalistic, norma demokrasi, dan hak-hak azasi manusia yang difasilitasi oleh institusi-institusi sosial dan politik. (Jayadi, 2007)

Sedangkan Samuel P Huntinton membagi demokratisasi menjadi tiga gelombang, yaitu demokratisasi gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Sebuah gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi rezim-rezim nondemokratis ke rezim-rezim demokratis, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya juga mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sisten-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis. Menurutnya tiga gelombang demokratisasi telah terjadi di masa modern. Antara lain :

1. Gelombang demokratisasi pertama

Gelombang pertama berakar pada revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Namun, kemunculan lembaga-lembaga demokrasi nasional

yang sesungguhnya merupakan fenomena abad ke-19. Dalam abad itu, lembaga-lembaga demokrasi di sejumlah besar negeri berkembang secara berangsur-angsur sehingga sulit serta subjektif untuk menyebut suatu waktu tertentu dimana setelah titik waktu itu system politiknya dapat dianggap demokratis

2. Gelombang demokratisasi kedua

Sebuah gelombang demokratisasi yang pendek mulai muncul pada masa perang dunia II. Pendudukan sekutu mendorong lahirnya lembaga-lembaga demokrasi di Jerman Barat, Italia, Austria, Jepang, dan Korea, sementara tekanan Soviet mematikan demokrasi yang baru lahir di Cekoslovakia dan Hongaria. Pada akhir dasawarsa 1940 dan awal dasawarsa 1950 Turki dan Yunani bergerak ke arah demokrasi. Di Amerika Latin, semasa perang dunia itu Uruguay kembali ke system demokrasi, dan Brazil serta Kosta Rika bergeser ke demokrasi pada akhir dasawarsa 1940

3. Gelombang Demokratisasi ketiga

Dalam masa 15 tahun setelah berakhirnya pemerintahan diktator Portugal pada tahun 1974, pada sekitar 30 negeri di Eropa, Asia dan Amerika Latin rezim-rezim demokratis menggantikan rezim-rezim otoriter. Di negeri-negeri lain, berlangsung liberalisasi yang cukup berarti dalam rezim otoriter. Di negeri-negeri yang lain lagi gerakan-gerakan yang mendorong pertumbuhan demokrasi memperoleh kekuatan dan legitimasi. (Samuel P Huntington, 1997a)

Di dalam proses demokratisasi ada juga yang disebut sebagai transisi demokrasi. Transisi di dalam konteks regenerasi politik artinya semua anggota masyarakat yang sudah dewasa dan siap mendapat kesempatan untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan negara. Di sisi lain, transisi adalah konteks sosial berarti juga proses yang mengarah pada berbagai bentuk perubahan masyarakat dan proses perubahan terjadi dari nilai lama ke nilai baru, sedangkan demokratisasi berarti adanya proses perubahan wacana identitas dalam struktur masyarakat dan anggota masyarakat lain dapat berperan dalam kehidupan politiknya. Demokratisasi juga merupakan suatu proses yang mengarah kepada pembentukan demokrasi di suatu negara (Jr, Fish, Hanson, & Roeder, 2002)

Transisi dari pemerintahan non-demokratis menuju pemerintahan yang demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Jika transisi menuju demokrasi diawali dengan kesadaran dari rezim otoriter bahwa mereka harus meninggalkan kekuasaannya, maka tahapan ini akan diakhiri dengan pembentukan sebuah pemerintahan baru berdasarkan pemilihan umum yang bebas. Namun prosesnya tidak berakhir disitu. Rezim yang baru sering kali menjadi demokrasi yang terbatas, lebih demokratis dari pemerintahan sebelumnya, namun belum berarti demokratis sepenuhnya. Bisa saja terjadi krisis dan kemuduran. Dan hasil dari perubahan rezim tidak selalu berupa demokrasi. Pada kenyataannya, proses penuh menuju demokrasi yang solid memakan waktu yang lama, seringkali puluhan tahun. (Sorensen George, 2003a)

Sorensen juga mengkaji transisi demokrasi memiliki beberapa tahap, yakni (1) tahapan persiapan, ditandai dengan perjuangan politik yang bergerak untuk melawan dan menghancurkan rezim non-demokrasi, (2) tahapan keputusan, yakni menertibkan berbagai elemen demokrasi, (3) tahapan konsolidasi, yakni memberdayakan demokrasi secara praktikal (Sorensen George, 2003b). Selain tahapan ada juga tantangan yang dihadapi dalam proses transisi demokrasi.

Huntington menjelaskan ada beberapa masalah transisi yang harus dihadapi dan dilakukan oleh pemerintahan demokrasi baru yang berkuasa, yakni (1) memapankan konstitusi baru, (2) mengadakan pemilu, (3) menyingkirkan para pejabat orde lama, (4) mencabut undang-undang kadaluwarsa dan bertentangan dengan HAM, (5) mengubah lembaga otoriter, seperti polisi, pengadilan dan intelejen, (6) mengembalikan aset negara, (7) memperkecil keterlibatan militer di pemerintahan, (8) menangani pelaku kejahatan di masa lalu. Selain itu, pemerintah baru juga akan menghadapi masalah krusial lainnya, seperti pemberontakan, konflik komunal, kemiskinan, inflasi, dan hutang luar negeri (Samuel P Huntington, 1997b).

Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter. Baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Di antara pemilihan,

keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, "metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara." (Sorensen George, 2003c) .

Salah satu negara yang melakukan demokratisasi untuk menjadi negara yang lebih demokratis adalah Myanmar. Dimana negara itu sudah berada di bawah kekuasaan Junta Militer selama 50 tahun. Dibawah Pemerintahan junta militer tidak ada yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul. Masih banyak larangan dan aturan yang dibuat oleh junta militer dan bersifat saklek. Setiap gerakan demokrasi yang muncul sudah pasti mendapat perlawanan dari rezim yang berkuasa. Secara sistematis rezim militer mampu melemahkan berbagai gerakan oposisi yang muncul dari masyarakat sipil. (Firnas, 2003)

Hingga pada akhirnya pada tanggal 4 Februari 2011 Presiden Thein Sein diangkat menjadi presiden sipil pertama setelah 40 tahun dipimpin oleh junta militer. Kemenangan Thein Sein dan wakilnya Tin Aung Myint Oo dan Sai Mauk Kham berada dibawah partai USDP pada pemilu 2010 dan resmi dilantik pada 30 Februari 2011. Dibawah pemerintahan Thein Sein

banyak perubahan besar yang terjadi untuk menuju negara demokrasi antara lain , pembebasan tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi, hingga pembukaan diri Myanmar ke dunia internasional (Apriyanti, 2014). Dapat dilihat bahwa ini merupakan awal langkah untuk demokratisasi Myanmar yang sudah lama ditunggu oleh dunia internasional.

2.2.2 Rezim Otoriter

Rezim otoriter merupakan prinsip kepatuhan buta terhadap otoritas , sebagai lawan dari kebebasan berpikir dan bertindak bagi individu. Dalam pemerintahan, otoritarianisme menunjukkan setiap sistem politik yang memusatkan kekuasaan di tangan seorang pemimpin atau elit kecil yang secara konstitusional tidak bertanggung jawab kepada tubuh rakyat. Pemimpin otoriter sering menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang dan tanpa memperhatikan badan hukum yang ada , dan mereka biasanya tidak dapat digantikan oleh warga negara yang memilih secara bebas di antara berbagai pesaing dalam pemilihan. Kebebasan untuk membentuk partai politik oposisi atau alternatif lain seperti pengelompokan politik untuk bersaing memperebutkan kekuasaan dengan kelompok penguasa sangat terbatas atau tidak ada dalam rezim otoriter (Encyclopaedia Britannica, 2017).

Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul gelombang demokratisasi ketiga menjelaskan bahwa, dalam sejarahnya rezim nondemokratis mempunyai bentuk yang sangat beragam. Rezim-rezim yang menjadi demokratis pada saat gelombang pertama umumnya berbentuk

monarki absolut, aristokrasi feodal yang sekarat dan negara-negara penerus empire Eropa. Negara-negara yang menjadi demokratis pada gelombang kedua sebelumnya merupakan negara-negara fasis, koloni, dan keditratoran militer perorangan dan sering telah memiliki sejumlah pengalaman dengan demokrasi. Rezim-rezim yang bergerak ke arah demokrasi dan yang beralih menjadi demokrasi pada gelombang ketiga umumnya tergolong dalam 3 kelompok, yakni system 1 partai, rezim militer, dan keditatoran perorangan (Samuel P Huntington, 1997a).

Salah satu negara yang pernah menganut rezim otoriter adalah Myanmar, yang dimana diawali dengan kudeta militer pada tahun 1962 maka dari itu termasuk kedalam rezim militer karena diciptakan melalui kudeta yang menggantikan pemerintahan demokratis sebelumnya dari pemerintahan sipil. Rezim militer sebagai negara 'di mana perwira militer adalah aktor utama atau dominan berdasarkan penggunaan kekuatan mereka yang sebenarnya atau terancam'. Dalam rezim-rezim ini, angkatan bersenjata mengontrol politik secara langsung atau tidak langsung (yaitu dengan mengarahkan pemimpin sipil di belakang layar). Dalam artikel asli Geddes (1999) tentang ketahanan rezim otoriter, dikatakan bahwa tipe rezim militer adalah versi otoritarianisme yang paling tidak stabil. Dalam rezim ini, militer menjalankan kekuasaan dengan landasan kelembagaan, dan para pemimpin militer biasanya memerintah bersama-sama dengan teman sejawatnya sebagai suatu junta (Wahman, Teorell, & Hadenius, 2013).

2.2.3 Reformasi Politik

Sedarmayanti menyatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (good governance)(Sedarmayanti, 2009). Kemudian Widjaja mengatakan bahwa reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi dan social budaya yang dianggap oleh masyarakat sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang. (Widjaja, 2011)

Menurut Atlantic Council, Reformasi politik merupakan masa ketika masyarakat di seluruh dunia melihat transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, reformasi politik seringkali diperlukan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan, memastikan perwakilan kelompok sosial yang adil, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fungsi pemerintah. Reformasi yang efektif dapat membantu membuat pemerintah lebih efektif, mendorong stabilitas dalam masyarakat, dan membuka potensi ekonomi. Baik diprakarsai oleh pemilih atau melalui proses akses ke pakta politik atau ekonomi multilateral, langkah-langkah reformasi politik dapat menjadi batu loncatan penting di jalan menuju pemerintahan demokratis yang sehat (Atlantic Council, 2020).

Lebih khususnya lagi, reformasi politik didefinisikan sebagai perpindahan dari tanpa partai atau satu partai ke system partai komepetitif dari rezim pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Dengan mengabaikan kebebasan politik, kebebasan berserikat dan berekspresi

seperti hak politik, hak untuk memilih dan untuk berkampanye. (Bates, 2007).

Di dalam suatu reformasi politik tentu saja akan berkaitan dengan beberapa aspek dan salah satunya adalah aspek ekonomi. Faktor seperti politik dan ekonomi merupakan faktor yang selalu saling melengkapi dan bersifat resipokral. Robert Gilpin menyatakan eratnya kaitan antara politik dan ekonomi itu sebagai berikut : Pada satu pihak, politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan; penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi merombak hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya hal itu merombak sistem politik, sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik. (Jones, 1993)

Selain itu Amartya Sen berpandangan bahwa demokrasi memiliki peran vital jelas segaris dengan pendekatan fundamental tentang sifat saling melengkapi antara negara dan pasar. Dimana pencabutan kebebasan politik dasar dan hak-hak sipil merupakan suatu pemiskinan. Krisis keuangan di beberapa negara terkait erat dengan tiadanya transparansi dalam bisnis, khususnya tiadanya kesempatan penilaian public untuk meninjau perjanjian finansial dan bisnis. Forum demokrasi yang efektif bisa berpengaruh dalam mencegah malpraktik, khususnya di kalangan petinggi. (Amartya, 2000)

Reformasi politik lebih mengarah kepada perubahan system politik yang ada di suatu negara. Yang tadinya otoriter atau hanya dikuasai oleh militer, beralih menjadi lebih bebas dan berasal dari masyarakat. Salah satu negara yang berhasil melakukan reformasi politik adalah Myanmar, dari pemerintahan junta militer ke pemerintahan sipil.

Salah satu reformasi politik yang dilakukan oleh Myanmar adalah Perombakan kabinet (*Cabinet Reshuffle*) merupakan kebijakan yang dilakukan presiden U Thein Sein bertujuan untuk mengeluarkan atau menyingkirkan pihak-pihak yang radikal atau anti reformasi. Pada tanggal 27 Agustus 2012 ia mengatakan bahwa akan melakukan perubahan terhadap 9 kursi dari 29 pos dalam kabinetnya. Selain itu perombakan ini juga menghasilkan 15 orang diangkat sebagai deputi menteri baru. Secara keseluruhan pada reformasi kabinet tersebut terdapat 20 menteri yang direshuffled, 2 mengundurkan diri dan ada 20 wakil menteri yang ditunjuk.(Robinson & Pilling, 2012). Ini merupakan suatu awal reformasi politik yang dilakukan oleh Myanmar untuk menata kembali negaranya menuju negara yang demokratis.

2.2.4 Reformasi Politik Myanmar

Reformasi politik Myanmar adalah serangkaian reformasi politik, ekonomi dan administrasi di Myanmar yang dilakukan oleh pemerintah yang didukung militer. Reformasi ini termasuk pembebasan pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah dan dialog berikutnya dengannya, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, amnesti umum lebih dari 200 tahanan politik,

institusi undang - undang ketenagakerjaan baru yang memungkinkan serikat pekerja dan pemogokan , pelanggaran sensor pers , dan peraturan praktik mata uang. Sebagai konsekuensi dari reformasi tersebut, ASEAN telah menyetujui tawaran Myanmar untuk menjadi ketua pada tahun 2014. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengunjungi Myanmar pada tanggal 1 Desember 2011, untuk mendorong kemajuan lebih lanjut; itu adalah kunjungan pertama Sekretaris Negara dalam lebih dari lima puluh tahun. Presiden Amerika Serikat Barack Obama berkunjung satu tahun kemudian, menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi negara itu (BBC News, 2011b).

Burma berada di bawah kekuasaan militer dari 1962 hingga 2010. Pada 2008, Junta militer yang berkuasa bersama State Peace and Development Council (SPDC), mengumumkan konstitusi baru sebagai bagian dari Roadmap to Democracy . Konstitusi, yang mencadangkan 25% kursi legislatif Hluttaw untuk militer, dipandang oleh pihak oposisi sebagai alat untuk melanjutkan kendali militer di negara itu. Referendum konstitusi diadakan pada tahun 2008 di tengah Topan Nargis . Pengamat mengkritik referendum untuk intimidasi pemilih, kecurangan pemilu dan pemungutan suara lebih awal. Namun demikian, pada 15 Mei 2008, junta mengumumkan bahwa konstitusi telah disetujui oleh 92,4% pemilih, mengklaim 99% pemilih di dua pertiga daerah yang telah mengadakan pemungutan suara (Turnell, 2011).

Meskipun demikian pada 2010 pemilu pertama dilakukan oleh Myanmar yang mengubah nama dari *Union of Myanmar* menjadi *Republic of Myanmar*. Pemilu ini dimenangkan oleh partai Union Solidarity and Development Party yang didukung oleh militer. Dengan presiden Thein Sein sebagai pemenang kursi Presiden, dikarenakan pada saat itu partai NLD tidak bisa ikut berpartisipasi. Dan Aung San Suu Kyi sebagai penyuru demokrasi di Myanmar tidak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden karena tidak memenuhi syarat. Akan tetapi pada pemilu 2012 partai NLD dapat memenangkan suara rakyat dan Aung San Suu Kyi mendapatkan jabatan sebagai penasihat negara. (Toshihiro, 2011a) dan dari sinilah dimuali masa reformasi Myanmar dengan pemimpin sipil pertama setelah 40 tahun lebih.

Banyak perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh Presiden U Thein Sein, salah satunya adalah *Cabinet Reshuffle* yang dilakukan dengan tujuan untuk menggugurkan orang-orang yang anti-reformasi. Kemudian ada pula kebijakan mengenai penegakan Hak Asasi Manusia. Hal yang paling mendasar di lakukannya adalah membentuk *Myanmar National Human Rights Commission* (MNHRC) pada 5 September 2011. (International Bar Association, 2012). Tujuan pembentukan komisi ini adalah untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Reformasi ini bertujuan untuk menjadikan Myanmar negara yang lebih demokrasi dan mengedepankan hak-hak manusia

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas dan diperkuat oleh beberapa asumsi dari kerangka pemikiran, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

“Dengan terjadinya Reformasi Politik di Myanmar maka pertumbuhan perekonomian di Myanmar akan membaik ditandai dengan kenaikan GDP Myanmar dari tahun 2010-2015”

2.4 Verifikasi Variable dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas : Dengan terjadinya Reformasi Politik di Myanmar	1. Perombakan kabinet <i>(Cabinet Reshuffle)</i>	Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, presiden mengatakan dia telah mengubah sembilan dari 29 jabatan kabinet. Kementerian informasi, industri dan perencanaan nasional dan pembangunan ekonomi termasuk di antara mereka yang terkena dampak. Perombakan tersebut merupakan yang terbesar sejak pemerintahan Thein Sein menjabat pada Maret 2011 setelah junta militer menyerahkan kekuasaan. Secara keseluruhan pada reformasi kabinet tersebut terdapat 20 menteri yang

		<p>direshuffled, 2 mengundurkan diri dan ada 20 wakil menteri yang ditunjuk. Dominasi militer Burma berada di parlemen dan sistem politiknya, dengan total 25% anggota parlemennya berasal dari angkatan bersenjata.</p> <p>Sumber :</p> <p>https://www.bbc.com/news/world-asia-19389920</p>
	<p>2. Penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar.</p>	<p>Dalam pemerintahan Presiden Thein Sein melakukan berbagai upaya untuk menegakan hak asasi manusia di Myanmar dan salah satunya adalah dengan membentuk Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) pada 5 September 2011. MNHCR berbasis di Yangon, dan didirikan atas perintah eksekutif dari presiden U Thein Sein secara langsung. Komisi ini memiliki 15 anggota komisi yang berperan penting. Para anggota yang bekerja di komisi ini secara umum memiliki latar belakang militer, sipil, dan akademisi.</p> <p>Sumber :</p> <p>https://www.burmalibrary.org/en/the-rule-of-law-in-myanmar-challenges-and-prospects</p>

<p>Variabel Terikat :</p> <p>Pertumbuhan perekonomian di Myanmar akan membaik.</p>	<p>1. Investasi Asing meningkat setiap tahunnya.</p>	<p>1. Burma telah lama berada dalam cengkeraman kelesuan ekonomi yang diilhami oleh militer. Namun, perasaan bahwa tahun pertama demokrasi baru nominalnya akan memberikan kelegaan telah dibantah secara dramatis oleh spiral investasi berlebihan. investasi asing berubah dari \$ 300 juta pada 2009-10 menjadi \$ 20 miliar yang mengejutkan pada 2010-11 - lebih dari seperempat PDB negara itu. Semua investasi selama periode ini sebagian besar dari Asia, Inggris dan Rusia.</p> <p>Sumber :</p> <p>https://www.researchgate.net/publication/286442027_The_Role_of_Foreign_Direct_Investment_FDI_in_Myanmar</p>
	<p>2. Dilakukan banyak kerjasama di bidang ekonomi dengan negara lain</p>	<p>2. Sejak 2011, Myanmar telah memulai reformasi kebijakan undang- undang antikorupsi , nilai tukar mata uang , undang-undang investasi asing, dan perpajakan .Amerika Serikat , Australia dan Uni Eropa telah menyerukan tindakan lebih lanjut, seperti pembebasan tanpa syarat semua tahanan politik, sebagai prasyarat untuk pencabutan sanksi</p>

		<p>internasional terhadap pemerintah Myanma. Amerika Serikat menunjuk utusan khusus, Derek Mitchell , untuk memetakan kebijakan baru dari Myanmar yang jauh dari isolasi. Selain itu Myanmar juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara salah satunya Indonesia.</p> <p>Hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar terus menguat dari tahun ke tahun selama periode tahun 2010-2014. Hal ini antara lain terlihat dari meningkatnya intensitas kunjungan atau pertemuan di tingkat pejabat tinggi baik yang berlangsung di Myanmar maupun dari pejabat Myanmar yang berkunjung ke Indonesia, khususnya dalam 2 tahun terakhir mulai tahun 2013-2014, dimana terdapat kunjungan kenegaraan presiden RI pada bulan april 2013 serta kunjungan atau kehadiran presiden RI pada bulan mei 2014 dan November 2014 saat berlangsungnya KTT ASEAN ke 24 dan 25 Nay Pyitaw, Myanmar.</p> <p>Selain Indonesia, Myanmar juga menjalin kerjasama dengan Thailand. Demi menggalang kekuatan ekonomi dan politik, kedua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Thailand dan</p>
--	--	---

Myanmar sepakat untuk memperluas kerjasama mereka di berbagai bidang. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra bertemu dengan Presiden Myanmar Thien Sein mengumumkan kesepakatan mereka pada 24 Juli 2012. Menurut Premier, Thailand telah mengusulkan 4 proyek pengembangan bersama ke Myanmar, termasuk meningkatkan potensi pekerja asal Burma, mempersiapkan Myanmar menjadi tuan rumah ASEAN tahun 2014, reformasi ekonomi dan pembangunan alternatif serta pembangunan infrastruktur.

Sumber :

- <https://kemlu.go.id/download/L1B1Ymxpc2hp bmdJbWFnZXMvTGZldHMvRXRjJTIwTWVudS9BbGxJdGVtcy9SZW5zdHJhJTIwS0JSSUyMFhbmdevbiUyMDIwMTUtMjAxOS5wZGY=>
- <https://internasional.kontan.co.id/news/thailand-dan-myanmar-perluas-kerjasama>

2.5 Skema dan Alur Penelitian

